PENDEKATAN EMPIRIK DALAM ANTROPOLOGI HUKUM

Nama : Hafizul Ihsan
Email: hafizulhsan98@gmail.com
No BP: 2010003600116
Universitas Eka Sakti

A. PENDAHULUAN

Antropologi mempelajari kebudayaan manusia sebagai suatu yang utuh di mana bagian-bagiannya saling berkait-an. Karena itu maka hukum yang di-amati bekerja di semua kebudayaan manusia, tidak dipelajari secara tersen-diri, tetapi dilihat brkaitan dengan , segi-segi yang lain dari masyarakat dan kebudayaan. Dalam usaha menelaah hukum, misalnya maka latar belakang budayanya merupakan hal yang penting dipelajari. Antropologi mempelajari gejala-gejala masyarakat, secara lintas budaya, artinya konteks di mana gejala itu terdapat tidak hanya dibatasi pada suatu kebudayaan tertentu. Seorang ahli hukum yang biasa dengan hukum yang terdapat dalam masyarakat modern, tanpa menyadarinya sering mengang-gap hukum, identik dengan hukum yang sesuai dengan sistem masyarakat yang sudah modern. Maka dia tidak peka terhadap hukum yang berlaku berdasarkan kekuatan hukum rakyat. Lain halnya dengan pendekatan anthropologi.

Antropologi mengamati bahwa dalam masyarakat mana pun selalu ada usaha untuk mewujudkan ketertiban sosial keteraturan sosial. Ini tercapai akibat dari suatu mekanisme yang disebut pengendalian sosial. Mekimisme itu dipandangnya sebagai suatu kontinum, suatu yang berkesinambungan, karena berbagai. norma pengatur kelakuan, oleh para warga masyarakat tidak dihayati secara tegas terpisah.

Atropologi menelaah, hukum itu dengan bertolak dari kenyataan dengan pendekatan empiris. Dalam pengamatan-pengamatan empiris kelihatan bahwa hukum yang dirumuskan secara universal, artinya berlaku umum untuk suatu wilayah tertentu, dalam penerapannya diwarnai oleh ciri-ciri lokal; Hal lain yang juga sangat disadari ada-lah bahwa hukum formal

adalah suatu cara pengaturan masyarakat yang diharapkan akan memungkinkan terwujudnya ketertihan. Dalam usaha mencapai kedamaian bila ada konflik-konflik, dalam masyarakat sendiri berkembang norma-norma ciptaannya sendiri, yang disepakati dan norma-norma informal demikian ini pun menjadi obyek telaah antropologi.

Berdasarkan pendekatan demikian terhadap hukum, maka dari segi kepentingan ilmu antropologi tidak lagi cukup diperoleh pemahaman mengenai bekerjanya hukum di berbagai masyarakat, diberbagai golongan dalam suatu masyarakat, dengan menekuni cabang-cabang ilmu yang ada yang menyoroti hukum itu. Suatu spesialisasi kemudian berkembang yaitu oleh sebagian dinamakan antropologi hukum oleh yang lain etnologi hukum. Dengan titik tolak tersebut diatas maka dalam cabang ilmu itu, telah berkembang tradisi ilmiah untuk menelaah berbagai aspek hidup yang berkaitan dengan hukum di mana diterapkan metode-metode penelitian yang serasi dan berdasarkan penelitian-penelitian yang diadakan serta pendekatan-pendekatan teoretis tertentu, maka., berbagai kerangka-kerangka pemikiran teori telah juga mengendap dalam cabang ilmu ini.

Perumusan masalah dan tujuan penelitian sedikit banyak telah menampakkan arah dan pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian itu. Perumusan masalah dan tujuan penelitian akan memberikan sinyal kearah manasuatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan diterapkan, bila permasalahan dan tujuan penelitian terfokus pada unsur hukum idial (SoerjonoSoekanto et.al) atau konsep yang pertama kedua (Soetandyo Wignjosoebroto), maka pendekatan kajiannya terarah pada penelitian hukum normatif, namun apabila permasalahan dan tujuan penelitian terfokus pada unsur hukum idiel atau konsep ketiga, empat atau ke lima, maka penelitian hukum itu akan menerapkan pendekatan empiris/sosiologis.

B. PEMBAHASAN

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris (empirical legal research). Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun oleh para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah atau an illogical phenomena. Penerimaan terhadap suatu yang bersifat ilmiah biasanya dipredikatkan dengan ungkapan “masuk akal”, sedangkan penerimaan terhadap suatu yang bersifat metafisika dan spiritual biasanya disebut sebagai kepercayaan.

Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (law as written in book), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang “ought to be” itu. Selanjutnya cara pandang sebagaimana disebutkan tadi bergeser menuju perubahan ke arah kesadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Di sisi lain, mengingat para penstudi hukum sejatinya

tidak terlatih melakukan penelitian sebagaimana dimaksud, dan faktanya memang tidak dipersiapkan untuk itu, maka peranan para ilmuwan sosial berikut metode-metode penelitian bahkan teori-teorinya dibutuhkan oleh sebagian penstudi hukum yang ingin melakukan penelitian di bidang hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial (socio-legal research²¹) maupun disebut dengan penelitian hukum interdisipliner, karena kadang-kadang bersentuhan dengan ilmu ekonomi, antropologi, bahkan ilmu politik dan lain-lain. Penelitian hukum normatif/doktrinal yang di dalam literatur hukumasing biasa disebut dengan legal research dan tanpa tambahan makna lain, menurut sebagian penstudi hukum dikatakan sebagai penelitian hukum yang murni (the pure legal research).²² Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa disamping penelitian hukum yang murni sebagaimana telah diuraikan di atas masih terdapat jenis penelitian lain yang mendampinginya dan biasa dipelajari oleh para penstudi hukum dibawah judul kuliah “Metode Penelitian Hukum” (dalam hal ini di Indonesia khususnya), dan mungkin kenyataan ini yang menjadikan penelitian hukum dikatakan sebagai penelitian yang khas.

Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka,²³ melainkan juga empiris atau kenyataan hukum. Basis perkembangan socio legal research di United Kingdom/UK ternyata berada di fakultas-fakultas hukum (law school) dan ditekuni oleh para penstudi hukum, bukan di fakultas-fakultas ilmu sosial (social science), meskipun socio legal study sangat erat kaitannya dengan kajian sosiologi hukum (sociology of law).²⁴ Socio legal study merupakan studi hukum interdisipliner maupun salah satu pendekatan dari penelitian hukum (a methodological approach) yang bahkan terkesan bertolak belakang sekali dari kajian hukum yang sifatnya doktrinal. Socio-legal tidak disamakan dengan legal sociology di negara-negara Eropa Barat, bahkan law and sociology

scholarship di USA, dimana peranan ilmu sosiologi lebih dominan dalam kajiannya. "Socio". Dan di dalam socio-legal studies tidak mengacu kepada ilmu sosiologi maupun ilmu-ilmu sosial, melainkan "an interface with a context within which law exist"²⁵ Oleh sebab itu, mengapa disaat para peneliti socio-legal menggunakan teori-teori sosial tertentu sebagai alat bantu analisis tidak diarahkan untuk menjadi kajian ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya, melainkan diarahkan untuk kajian ilmu hukum. Namun ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, bagi socio-legal studies sangat diperlukan peranannya yaitu guna meminta/memperoleh data-data saja, hal ini sangat beralasan mengingat bahwa ilmu sosiologi misalnya, memiliki karakteristik yang deskriptif dan kategoris.

Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang lebih dulu ada ditengah-tengah keluarga besar disiplin hukum, socio-legal research biasanya dikembangkan dalam suatu lembaga-lembaga independen, seperti di Indonesia misalnya: ELSAM dan HUMMA. Sedangkan di Negara lain seperti Inggris misalnya lembaga tersebut juga ada yang independen maupun berada dibawah naungan law school atau faculty of law, seperti: University College London (UCL) School of Law UK dengan The Centre for Empirical Legal Studies-nya. Dimana maksud dan tujuannya lembaga tersebut adalah:

Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari... Depri Liber Sonata³⁰ Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang lebih dulu ada ditengah-tengah keluarga besar disiplin hukum, socio-legal research biasanya dikembangkan dalam suatu lembaga-lembaga independen, seperti di Indonesia misalnya: ELSAM dan HUMMA. Sedangkan di Negara lain seperti Inggris misalnya lembaga tersebut juga ada yang independen maupun berada dibawah naungan law school atau faculty of law, seperti: University College London (UCL) School of Law UK dengan The Centre for Empirical Legal Studies-nya. Dimana maksud dan tujuannya lembaga tersebut adalah:²⁷ "...to bring together experts across a range of social science disciplines to engage in interdisciplinary research with a bearing on law. The

Centre's ambitions are to be a world leader of methodological innovation in empirical legal studies, to build research capacity in the United Kingdom and to promote the evidence led evolution of justice systems around the world.

Sedangkan bidang-bidang penelitiannya adalah:

"The emphasis of the work of the centre is on interdisciplinary empirical research investigating the operation and effects of law within the context of the social, economic and political environment. The work of the centre is concerned with the role and function of law, the enforcement of law, compliance with law, resistance to law, the use and experience of law, the impact of law and the character of law itself".

Ilmu hukum (jurisprudence) dan segala sub kajian yang mendasarinya di dalam keluarga besar kajian tentang hukum, terlepas dari kontroversinya sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri dan khas (sui generis), bagian dari ilmu humaniora maupun ilmu sosial, sebagaimana ilmu pengetahuan alam (eksakta) dan ilmu-ilmu sosial yang telah memiliki tempat yang tak terbantahkan di ranting-ranting pohon ilmu. Ilmu hukum harus diakui memiliki metode penelitian yang khas sekaligus unik, baik dilihat dari kepentingan/kegunaan dilakukannya suatu penelitian di bidang hukum, baik teoritis maupun praktis, atau dari cara melihat ilmu hukum sebagai disiplin yang bersifat preskriptif dan terapan, maupun dari sudut pandang perilaku manusia yang berkaitan dengan eksistensi hukum.

Lebih dari itu, hal yang terpenting adalah ketepatan saat menentukan pilihan terhadap jenis dan metode man yang terbaik atau paling sesuai bagi penelitian yang akan dilakukannya, tentunya hal tersebut mengacu kepada kegunaan/tujuan dan hasil akhir yaitu terjawabnya permasalahan yang melatarbelakangi/menginspirasi dilakukannya suatu penelitian hukum tertentu, kemudian yang tidak kalah penting adalah menjadi lebih berkembangnya kajian keilmuan hukum dan terselesaikannya masalah-masalah hukum baik sifatnya konkret (perkara hukum/legal disputes) maupun permasalahan pembangunan hukum di masa mendatang.

C. PENUTUP

Sebagai akhir sajian ini ingin diketengahkan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam seluruh sajian ini. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sajian ini adalah Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk memanusiakan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idial atau konsep hukum *ius constituendum* dan *ius constitutum*, maka kajian pendekatannya bersifat yudis normative-logika deduktif, bila masuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris/sosiologis-logika induktif. Secara singkat dapat dinyatakan satu rumus atau formula Metode adalah fungsi dari Permasalahan dan Unsur Hukum; Metode adalah fungsi dari permasalahan dan konsep hukum. Pendekatan kajian hukum normatif dan empiris/sosiologis masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri bila dilihat dari unsur-unsur yang lazimnya terdapat dalam pembicaraan tentang metode penelitian. (metode pendekatan, kerangka pemikiran-konseptual/teoritik, data dan sumber data, metode analisis data, pembuktian, langkah penelitian dan tujuan yang dapat dicapai secara maksimal dari penelitian).

DAFTAR PUSTAKA

- Gokma Toni Parlindungan S, *Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Negeri Pasaman Sebagai Ceriminan Ius Constitutum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Gokma Toni Parlindungan S, *Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,
- Harniwati, *Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, *Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif*, Ensiklopedia Education Review, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020
- Mia Siratni, *Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,
- Remincel, *Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- R Amin, B Nurdin, *Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019*, Soumatera Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2020.